BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kecamatan baron merupakan Lembaga pemerintahan dengan SOP sebagai alat penilaian kinerja internal kelembagaan dan akuntanbilitas yang bersumber pada laporan keuangan disesuaikan dengan pedoman keuangan, kebijakan keuangan dan SOP yang berlaku. berikut ini penerapan SOP dan akuntanbilitas dikecamatan baron :

1. Transparansi pada pelayanan administrasi kependudukan (KTP dan KK) berjalan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kejelasan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diinformasikan secara terbuka. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur yang ada yang dikarenakan kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Baron.

2. Akuntabilitas kinerja dalam penerapan SOP pada pelayanan administrasi kependudukan (KTP dan KK) didasarkan pada kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa layanan administrasi kependudukan tersebut. Rekap data kinerja belum dibuat secara formalitas sehingga sulit jika dilakukan monitoring kinerjanya.

Pengertian akuntansi pemerintahan ialah akuntansi (pemerintahan termasuk itu akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya) yang di dalam bidang

akuntansi, berhubungan atau berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan juga beberapa lembaga yang tujuannya itu bukan untuk mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan tersebut ukurannya besar, tapi sebagaimana pada perusahaan tersebut termasuk juga ke dalam lembaga mikro. sesuai dengan pengertian akuntansi pemerintahan diatas kecamatan Baron sudah memenuhi ketentuan yaitu pelayananya tidak beracu kepada profit dan menyediakan pelayanan secara terbuka dan sudah menerapkan SOP secara baik dan menerapkan SOP sebagai acuan untuk bertindak Dengan adanya SOP pemerintah lebih transparan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kembali dengan jelas mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan agar masyarakat memahami dengan baik tata cara kepengurusan administrasi kependudukan tersebut. Selain itu perlu pula adanya *website* Kecamatan Baron untuk membantu sosialisasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan.
2. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron khususnya pelayanan administrasi kependudukan perlu tambahan rekap data penilaian